**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2000**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. [□] bahwa dengan dibentuknya Dinas Tata Ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang Kabupaten Lampung Selatan, maka Kewenangan Pengelolaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan diserahkan kepada Dinas Tata Ruang Kabupaten Lampung Selatan ;
- b. bahwa dengan telah diserahkannya kewenangan pengelolaan retribusi Izin mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu dicabut dan dituangkan kembali dengan Peraturan daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang-Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 Tentang Izin Mendirikan Usaha Industri.
6. Peraturan Daerah Nomor 51 tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri.
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang gangguan Bagi Perusahaan Industri.
9. Keputusan Daerah Nomor 23 Tahun 1986 Tentang Wewenang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang Kabupaten Lampung selatan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
- c. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Lmpung Selatan.
- d. Dinas Tata Ruang adalah Dinas Tata Ruang Kabupaten Lampung selatan.
- e. Bangunan adalah setiap susunan bahan bangunan yang terpadu, ditanam di dalam atau ditempatkan di atas tanah terletak di atas pondasi.
- f. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengelolaan yang dilengkapi dengan sarana prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang diadakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
- g. Perusahaan Kawasan Industri adalah Perusahaan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indaonesia ynung mengelola kawasan industri.
- h. Perusahaan industri adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri dan di luar kawasan industri.
- i. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan dalam rangka mndirikan bangunan secara fisik.
- j. Prosentase maksimal adalah angka prosentase tertinggi untuk perkalian dalam komponen perhitungan Retribusi IMB.
- k. Kas Daerah adalah kas Daerah Kabupaten Lampung selatan.
- l. Retribusi adalah pungutan sejumlah uang atas pemberian IMB.
- m. Upah pungut adalah pemberian insentif pada Dinas Pengelola Izin Mendirikan Bangunan atas usaha yang dilakukan dalam Pemasukan Pendapatan Daerah.

BAB II PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang, badan usaha, badan hukum, perusahaan dalam kawasan industri dan perusahaan industri yang akan mendirikan bangunan dan sarana penunjang lainnya wajib mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, diajukan kepada Bupati.

Pasal 3

Dalam mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan, orang badan hukum, badan usaha, perusahaan kawasan industri, dan perusahaan industri melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Izin peruntukan dan penggunaan Tanah atau Surat izin lokasi.
- b. Kartu Tanda Penduduk atau Bukti diri Penandatanganan Pemohon.
- c. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berstatus badan hukum/badan usaha atau anggaran dasar yang disahkan bagi koperasi.
- d. Surat Kuasa apabila penandatanganan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.
- e. Rekaman Sertifikat hak atas tanah atau bukti pemilikan tanah.
- f. Rekaman Tanda Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir.
- g. Surat pernyataan pemohon tentang kesanggupan mematuhi persyaratan-persyaratan teknis bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- h. Rekaman rencana tata bangunan dan prasarana kawasan industri yang berlokasi di kawasan industri.
- i. Melampirkan gambar konstruksi bangunan.

BAB III PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Tata Ruang mengadakan penelitian kelengkapan persyaratan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Jika persyaratan sudah lengkap dan benar, permohonan diterima dan diberikan tanda bukti penerimaan.
- (3) Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menetapkan besarnya retribusi dan berdasarkan penetapan tersebut, pemohon membayar retribusi.
- (4) Apabila pemohon telah membayar retribusi maka pemohon dapat melaksanakan pembangunan secara fisik.
- (5) Apabila bangunan telah selesai pemohon wajib menyampaikan laporan secara tertulis dilengkapi dengan :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan dari pengawas yang terakreditasi.
 - b. Gambaran siap bangun (*Asbuil Drawing*).
 - c. Rekaman bukti pembayaran retribusi.